

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM KULINER
DI KELURAHAN MOSSO, KECAMATAN SENDANA,
KABUPATEN MAJENE, PROVINSI SULAWESI BARAT**

**ASNUR
G211 16 326**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM KULINER
DI KELURAHAN MOSSO, KECAMATAN SENDANA,
KABUPATEN MAJENE, PROVINSI SULAWESI BARAT**

**ASNUR
G211 16 326**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Sosial Ekonomi Pertanian

Fakultas Pertanian

Universitas Hasanuddin

Makassar

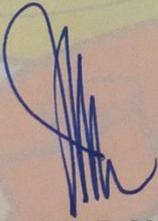
**DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

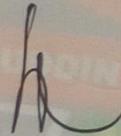
LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Kuliner di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
Nama : Asnur
Nim : G211 16 326

Disetujui oleh,



Ir. Rusli M. Rukka, S.P., M.Si.
Ketua



Prof. Ir. Muhammad Arsyad, S.P., M.Si., Ph.D.
Anggota

Diketahui Oleh



Dr. A. Nixia Tenriawaru, S.P., M.Si.
Ketua Departemen

Tanggal Lulus : 18 Agustus 2022

**PANITIA UJIAN SARJANA PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN
UMKM KULINER DI KELURAHAN MOSSO,
KECAMATAN SENDANA, KABUPATEN MAJENE,
PROVINSI SULAWESI BARAT

NAMA : ASNUR

NIM : G211 16 326

SUSUNAN PENGUJI

Rusli M. Rukka, S.P., M.Si

Ketua sidang

Prof. Ir. Muhammad Arsvad, S.P., M.Si., Ph.D.

Anggota

Dr. A. Nixia Tenriawaru, S.P., M.Si.

Anggota

Rasvidah Bakri, S.P., M.Sc

Anggota

Tanggal Ujian : 18 Agustus 2022

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul “peran pemerintah dalam pengembangan (UMKM) kuliner di kelurahan mosso, kecamatan sendana, kabupaten majene, provinsi sulawesi barat”. benar adalah karya saya dengan arahan dosen pembimbing, belum pernah diajukan atau tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Saya menyatakan bahwa, semua sumber informasi yang digunakan telah disebutkan di dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Makassar, 18 Agustus 2022



ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM KULINER DI KELURAHAN MOSSO, KECAMATAN SENDANA, KABUPATEN MAJENE, PROVINSI SULAWESI BARAT

Rusli M. Rukka¹, Muhammad Arsyad², Asnur³, Rasyida Bakrie⁴,
A. Nixia Tenriawaru⁵

¹Program Studi Agribisnis, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas
Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar.

**Corresponding author:* asnuragus@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis kebijakan peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Analisis ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Analisis Data Sekunder (ADS). Informan dan responden dalam penelitian ini adalah instansi yang berkaitan dengan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kuliner yaitu, kepala bidang koperasi dan Kepala staf lapangan Bidang Koperasi UMKM masing – masing berjumlah 1 orang. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator mampu melihat dengan baik kebutuhan dan kebijakan seperti apa yang diperlukan oleh para pelaku usaha kuliner dalam program pemerintah dinas koperasi, UKM, perdagangan dan perindustrian. Namun dalam pelaksanaannya beberapa pelaku usaha tidak kooperatif dalam mendukung program tersebut sehingga berdampak pada tidak signifikannya berkembangnya usaha kuliner yang dilakukan.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),

ABSTRACT

ROLE OF GOVERNMENT IN DEVELOPING CULINARY MSMEs IN MOSSO VILLAGE, SENDANA DISTRICT, MAJENE REGENCY, WEST SULAWESI PROVINCE

**Rusli M. Rukka¹, Muhammad Arsyad², Asnur³, Rasyida Bakrie⁴,
A. Nixia Tenriawaru⁵**

¹Agribusiness Study Program, Department of Agricultural Socioeconomics, Faculty of Agriculture, Hasanuddin University, Makassar.

***Corresponding author: asnuragus@gmail.com**

This research aims to analyze the policy role of the government as a facilitator, regulator and catalyst in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Mosso Village, Sendana District, Majene Regency, West Sulawesi Province. This analysis uses descriptive quantitative research methods with Secondary Data Analysis (SDA) approach. informants and respondents in this study were agencies related to the development of culinary micro, small and medium enterprises (MSMEs), namely, the head of the cooperative field and the head of the field staff for the MSMEs cooperative sector, each totaling 1 person. the results of this study concluded that the government as a facilitator, regulator and catalyst is able to see well the needs and policies needed by culinary business actors in government programs for cooperatives, SMEs, trade and industry. but in practice some business actors are not cooperative in supporting the program so that it has an insignificant impact on the development of the culinary business carried out.

Key Words:*The Role of the Government, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs),*

RIWAYAT HIDUP PENULIS



ASNUR, lahir di Manyamba pada tanggal 15 februari 1998, merupakan putra pertama dari Agus Nonci dan Ibu Kurniati. Adapun penulis pernah menempuh pendidikan formal, yaitu :

1. SDN INP 39 Manyamba, tahun 2004 – 2010.
2. SMP Negeri 4 Sendana, tahun 2010 – 2013.
3. SMK Negeri 7 Majene, tahun 2013 – 2016.

4. Universitas Hasanuddin, dinyatakan Lulus melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, untuk jenjang pendidikan strata satu (S1) tahun 2016.

Aktivitas penulis selama menjadi mahasiswa adalah mengikuti perkuliahan, aktif mengikuti seminar – seminar mulai dari tingkat regional, nasional hingga tingkat internasional. Selain itu penulis juga lebih aktif bekerja di beberapa profesi selama kuliah antara lain sebagai tukang antar galon dan bekerja di tempat laundry pakaian demi memenuhi kebutuhan hidup selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Dalam Pengembangan (UMKM) Kuliner di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat** sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) dalam program sarjana Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.

Perjalanan yang lumayan panjang telah penulis lalui dan berbagai rintangan telah penulis dihadapi dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat rahmat-Nya serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memiliki harapan yang besar untuk skripsi ini memberikan manfaat kepada semua pembacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberi perlindungan kepada kita semua.

Makassar, Agustus 2022

Asnur

PERSANTUNAN



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Peran Pemerintah Dalam Pengembangan (UMKM) Kuliner di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

Pada kesempatan kali ini, ijinkan saya mempersembahkan skripsi ini sebagai hadiah kecil untuk orang tua saya yaitu Bapak **Agus Nonci** dan ibu saya **Kurniati S.** Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan untuk beliau yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit demi saya bisa mencapai cita cita. Saya berjanji tidak akan membuat semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan hal terbaik disetiap kepercayaan yang diberikan.

Kepada saudara-saudara saya, terima kasih kepada Adik saya **Nurlutfia** dan **Nurfadeli** yang telah menjadi tempat berkeluh kesah saya ketika saya berada pada masa sulit saat penyusunan skripsi ini.

Begitu banyak pihak yang pengaruhnya sangat luar biasa pada penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati saya ijinkan saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Ir. Rusli M. Rukka, S.P., M.Si.** Dan Bapak **Prof. Ir. Muhammad Arsyad S.P., M.Si., Ph.D.** Selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dorongan, serta motivasi penuh dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga ingin meminta maaf apabila selama proses bimbingan pernah membuat kecewa. Penulis berharap semoga Bapak dan ibu senantiasa di beri kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.
2. Ibu **Dr. A. Nixia Tenriawaru, S.P., M.Si.**, dan Ibu **Rasyidah Bakri, SP., M.Sc.** selaku penguji terima kasih untuk kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Penulis meminta maaf atas tingkah laku yang kurang berkenan selama ini. Penulis juga ingin meminta maaf apabila selama proses bimbingan pernah membuat kecewa. Penulis berharap semoga bapak senantiasa di beri kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.
3. Segenap dosen dan seluruh staff akademik khususnya Program Studi Agribisnis Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas pertanian yang telah membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada penulis sebagai penunjang penyelesaian skripsi ini.
4. Keluarga besar **Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian 2016 (MASAGENA16)**. Terima kasih telah kebersamaan selama ini. Pengalaman yang luar biasa bisa mengenal kalian, berjalan bersama dari latar belakang yang berbeda. Terima kasih telah bersedia membantu saya dalam segala hal utamanya penyusunan skripsi ini.

Semoga kita semua bisa mencapai impian kita masing masing.

5. Untuk sahabat saya **Irna Fitria Marsyad** sebagai partner kembar KRS mulai dari semester 1 hingga selesai perkuliahan. Terima kasih telah banyak membantu saya di dalam dan di luar kelas, Maafkan segala kesalahan saya dan kejailan saya. Semoga kita tetap bisa berkumpul ketika berkarir nanti.
6. Untuk **Putri Wulan Sari, SP**, sebagai mentor terbaik kedua setelah pembimbing saya. Terima kasih arahannya, bantuannya serta waktunya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kecil saya saat penyusunan skripsi ini. Tanpa arahannya mungkin saya bisa lebih lama lagi dalam proses penyusunan skripsi.
7. Untuk **Hermawan Saputra** dan **Ahmad Zainal ashara**, sebagai partner ketika di perpustakaan, terima kasih telah meluangkan waktu menemani dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
8. Untuk teman-teman KKN Tematik kopi di Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, bang Barzan selaku kordes, bang novra sugiarsa, bang petrus, dewi, cindy, cici, dilla, sutra, ayu dan dian. Kalian luar biasa asik, kreatif dan pintar. Terima kasih untuk pengalaman KKN yang luar biasa walaupun hanya di habiskan di posko sebulan penuh dan rancangan program kerja yang luar biasa banyak.
9. **Kepada semua pihak** yang belum bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih banyak untuk semua pertanyaannya, untuk motivasinya, serta dukungannya. Demikianlah, semoga semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak, Amiin
Demikianlah dari penulis, semoga segala pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat kelak, Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	5
2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kuliner	6
2.3 Peran Pemerintah.....	7
2.3.1 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator	9
2.3.2 Peran pemerintah sebagai regulator.....	9
2.3.3 Pemerintah Sebagai Katalisator.....	10
2.4 Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	10
2.5 Penelitian Terdahulu.....	11
2.6 Kerangka Pikir Penelitian.....	13
III. METODE PENELITIAN.....	14
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	14
3.2 Metode Penelitian.....	14
3.3 Metode Pengumpulan Data	14
3.4 Metode Penentuan Informan	15
3.5 Metode Analisis Data	16
3.6 Defenisi Operasional	16
IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	17
4.1 Letak Geografis	17
4.2 Keadaan Penduduk	17
4.3 Gambaran Umum Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Majene	19
4.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majene.....	20
4.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas	20
4.4.2 Sekretariat.....	21
4.4.3 Bidang Koperasi dan UKM	22
4.4.4 Bidang Koperasi dan UKM	23
4.4.5 Bidang Perindustrian	25
4.4.6 Bidang Perdagangan	27
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31

5.1	Identifikasi Program Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Kuliner	31
5.1.1	Program Pemerintah Sebagai Fasilitator.....	31
5.1.2	Program Pemerintah Sebagai Regulator	34
5.1.3	Program Pemerintah Sebagai Katalisator	36
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	39
6.1	Kesimpulan.....	39
6.2	Saran.....	39
	DAFTAR PUSTAKA	41
	PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	42
	LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1.	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada periode 2017-2019.	3
2.	Penelitian Terdahulu	12
3.	Informan dalam penelitian	15
4.	Luas Wilayah Per Lingkungan di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, 2020.	17
5.	Kondisi demografi Berdasarkan Kelompok Umur di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, 2020.	18
6.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, 2020.	18
7.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, 2020.	19
8.	Jumlah Festival yang diikuti pelaku usaha UMKM kuliner di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.	34
9.	Pelatihan pelaku usaha UMKM kuliner di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.	36
10.	Seminar Kewirausahaan Pelaku Usaha UMKM kuliner di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.	38

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
1.	Skema Kerangka Pemikir	13

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia memiliki kebutuhan yang beranekaragam, namun ada kebutuhan primer yang harus dipenuhi, seperti: makanan, pakaian dan perumahan, kendaraan dan lain-lain. Kebutuhan ini merupakan syarat utama untuk mencari kemakmuran manusia. Usaha kuliner adalah daya upaya manusia yang berhubungan dengan penyediaan kesukaan orang lain dalam bidang makanan. Bentuk-bentuk usaha kuliner banyak sekali macamnya, antara lain: usaha rumah, usaha luar rumah, usaha di dalam kota, usaha diluar kota, usaha makanan atau minuman di tempat rekreasi tertentu dan usaha kuliner di kompleks tertentu (Indrawati, 2000).

Dalam pemenuhan kebutuhan manusia ada bisnis yang tidak mengenal masa dan tidak pernah mati yakni bisnis usaha makanan dan minuman atau yang dikenal dengan sebutan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bisnis ini hampir selalu ada di seluruh Indonesia, dimana pasaran yang dituju adalah untuk berbagai usia dan kelas masyarakat yang membutuhkan makanan dan minuman, baik skala besar maupun kecil. Berdasarkan keadaan dan kenyataan yang ada, maka bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bisnis yang sangat berpotensi untuk dikembangkan karena sangat menjanjikan dan akan memberikan keuntungan yang sangat menggiurkan kepada setiap pelaku usaha. (Utami, 2012).

Secara umum, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu di anggap sebagai adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas, Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerjakan tetapi bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah asset lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta dan omzet total Rp 300 juta sampai Rp 2,5 milyar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh cabang orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai Rp 10 milyar dan omzet total Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sendiri tidak akan bisa berkembang atau bahkan berjalan dengan baik jika tidak ada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pentingnya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini sebagaimana dikemukakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2015-2019, bahwa: "Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gede Diva (2009), menyatakan terdapat peran pemerintah yang menurutnya efektif dalam hal pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yakni sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Beberapa tugas dan fungsi pemerintah adalah sebagai fasilitator yakni membantu mencari jalan keluar agar para pelaku usaha mampu mendapatkan berupa pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak menjadi tergantung kepada pemerintah. Kemudian yang kedua adalah regulator yakni dalam hal membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya akan mempermudah pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya misalnya tentang aturan-aturan persaingan usaha. Fungsi terakhir dari pemerintah adalah sebagai katalisator yakni pemerintah berperan dalam mempercepat terjadinya pertumbuhan perkembangan usaha misalnya dengan melakukan pameran hasil kreativitas pelaku usaha agar produk dari pelaku usaha cepat dikenal oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang mengatur kegiatan usaha. Kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih kondusif guna mempercepat tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). disisi lain juga perlu mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan yakni antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia selama ini berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia menyumbangkan hingga Rp 8.573,9 triliun ke PDB Indonesia (atas dasar harga berlaku) pada 2018. PDB Indonesia pada 2018 sebesar Rp 14.838,3 triliun, maka kontribusi UMKM mencapai 57,8% terhadap PDB. kontribusi lainnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia adalah pada tenaga kerjanya. Untuk tenaga kerja, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berhasil menyerap hingga 121 juta tenaga kerja pada tahun 2018. Angka tersebut sekitar 96% dari serapan tenaga kerja Indonesia di 2018 yang sebesar Rp170 juta.

Selain besarnya peran pemerintah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga sangat memerlukan peran ekstra dari para pelaku usaha. Beberapa masalah umum yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam pengembangan usahanya juga tidak sedikit antara lain adalah masalah pemasaran, modal atau pendanaan, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, pemakaian bahan baku, peralatan produksi, penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, rencana pengembangan usaha, dan kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal. Menjamurnya *franchise* kuliner dari luar seperti *KFC*, *McDonalds*, dan lain-lain di beberapa tempat strategis di Indonesia memberi dampak buruk bagi pengusaha kuliner mikro kecil dan menengah dalam negeri. Beberapa tempat kuliner *franchise* ini memiliki beberapa pabrik di Indonesia, serta bahan baku berasal dari Indonesia. Pesisir pantai Provinsi Sulawesi Barat sepanjang 700 km khususnya di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene merupakan potensi wisata yang menarik dan menjanjikan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata dibidang kuliner. Dalam hal ini pemerintah pun sangat mendorong dikembangkannya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kuliner. Salah satu wisata yang menyajikan adalah aneka hidangan masakan produksi lokal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat yakni kuliner Jepa yang dihidangkan bersama ikan terbang atau bau peapi dan es kelapa muda serta aneka kue kering, kuliner jepa

itu sendiri adalah makanan yang berbahan baku ubi kayu yang kemudian diparut dan dimasak diatas wajan dan sangat pas jika dihidangkan dalam keadaan masih panas. Hasil kekayaan ubi kayu dan perikanan di Kecamatan Sendana sangatlah melimpah sehingga dari para petani dan nelayan mengelolanya menjadi produk unggulannya sangat menarik untuk dinikmati. Dengan dikembangkannya wisata kuliner pesisir di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat ini maka juga akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Sendana, di samping itu juga mendorong tumbuhnya ekonomi bagi daerah ini. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini bisa kita lihat pada tabel 1. Data Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian (2017-2019) Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 1. Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada periode 2017-2019.

Tahun	Jumlah UMKM di Kabupaten Majene	Jumlah UMKM kuliner di Kecamatan Sendana
2017	3.988	45
2018	3.958	51
2019	3.962	69

Sumber : Data Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian tahun 2019.

Kondisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara umum di Kabupaten Majene dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan pada tahun 2018 namun pada Kecamatan Sendana, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kuliner justru mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun dan menjadi indikator yang menandakan bahwa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berwirausaha, hal ini juga berdampak pada meningkatnya sisi keuangan, pertumbuhan asset dan modal kerja bagi para pelaku usaha. Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah itu sendiri tidak lepas dari peran pemerintah dalam membantu pelaku usaha dalam mengeluarkan program atau memfasilitasi para pelaku usaha.

Berdasarkan realitas dan penjelasan diatas merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis mengkaji lebih jauh tentang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dengan mengangkat judul penelitian, "**Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kuliner di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dirumuskan Bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kuliner di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan pokok masalah yang dihasilkan, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk Menganalisis kebijakan peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Manfaat

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi akademik, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu agribisnis.
2. Bagi pelaku UMKM, yaitu dapat menjadi tambahan pengetahuan agar bisa lebih bersinergi dengan semua pihak dalam mengembangkan usaha.
3. Bagi pemerintah, yaitu dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah dalam hal ini Dinas , UMKM dan Perindustrian Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat agar lebih memperhatikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kuliner tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha kecil merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja yang mampu diserap. Selain itu, tidak dapat disangka bahwa pengusaha kecil, yang merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu, berbagai upaya pemberdayaan perlu dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bab 1 pasal 1 yang dimaksud dalam UU ini adalah :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan badan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dalam Undang-Undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga maupun tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bab II pasal 3 adalah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Adapun Prinsip dan Tujuan pemberdayaan bagian kesatu pasal 4 Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dan ber prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - e. Penyelenggaraan Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.
- Bagian dua tujuan pemberdayaan pasal 5 adalah tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
 - b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 - c. Meningkatkan Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kuliner

Salah satu UMKM yang mempunyai peran sangat penting dalam perekonomian Indonesia yaitu UMKM kuliner. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, terdapat 56 juta pelaku UMKM di Indonesia dan 70% di antaranya adalah UMKM kuliner. UMKM kuliner ini berpotensi menjadi penggerak perekonomian Indonesia. UMKM kuliner mempunyai peran penting dalam perekonomian karena UMKM kuliner ini dapat mengatasi pengangguran, selain itu UMKM kuliner merupakan bisnis yang tidak akan pernah mati. UMKM kuliner terus berkembang pesat seiring permintaan konsumen yang terus bertambah dan kebutuhan konsumen yang beraneka ragam.

Dengan tingginya pelaku bisnis kuliner, membuat para pebisnis kuliner bersaing ketat. Ketatnya bisnis kuliner ini, menuntut para pelaku bisnisnya bisa lebih kreatif dan inovatif. Selain inovatif dan kreatif, pemasaran yang baik juga dibutuhkan dalam dunia usaha agar dapat bersaing. Sesuai dengan pernyataan Zimmerer W.T. (2002) “perusahaan yang memperhatikan dan melayani kebutuhan konsumennya akan lebih berhasil dibanding perusahaan yang mengabaikannya, namun pada umumnya pemasaran merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh UMKM di negara-negara berkembang. Oleh karenanya diperlukan pemasaran yang tepat bagi pelaku UMKM kuliner.

Hafsah (2004), Mengemukakan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat disebut sebagai penolong saat masa krisis ekonomi dan dapat meminimalkan dampak sosial yang menyertainya. Pada saat krisis ekonomi terjadi, banyak usaha-usaha besar gulung tikar akibat kontrol yang terlalu kaku dan mengedepankan hirarki sehingga inovasi dan kecepatan bertindak sulit untuk dilakukan. Berbeda dengan halnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memanfaatkan bentuk serta kelebihan usahanya sebagai tameng untuk melewati masa krisis ekonomi diantaranya yaitu :

1. Biaya produksi rendah

Sektor usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sektor usaha informal dimana modal serta faktor produksi yang dimiliki juga terbatas. Dengan rendahnya faktor produksi yang dimiliki, produksi yang dilakukan akan dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan faktor produksi yang ada, sehingga hasil akhirnya adalah penekanan biaya produksi sampai batas maksimalnya. Ketika krisis ekonomi terjadi, pelaku usaha akan dapat menyesuaikan dengan kenaikan harga karena pada awalnya biaya produksi yang dikeluarkan rendah.

2. Fokus Usaha

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) biasanya berdiri dengan mengandalkan satu produk yang unik dan merupakan ide dari pemiliknya, sehingga tidak hanya terpaku pada permintaan pasar. Oleh sebab itu saat krisis terjadi, permintaan pasar yang dulu tinggi bisa saja menurun, pelaku usaha dengan fokus usahanya tersebut dapat bertahan karena dari awal produknya memiliki pasar yang berbeda, yaitu pasar dimana masyarakat menyukai produk unik dari usahanya tersebut.

3. Fleksibilitas Usaha

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha yang didirikan dan dikelola oleh beberapa orang, bisa juga disebut tim kecil. Dengan sedikit pihak yang terlibat pada proses pengambilan keputusan, maka semakin cepat pula keputusan diambil karena semakin sedikit kepentingan sehingga mudah untuk dijadikan satu suara.

4. Kecepatan Bertindak

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menganut konsep kekeluargaan dalam menjalankan usahanya, sehingga antara pelaku usaha di dalamnya tidak terlalu ada hirarki yang sangat ketat mengatur. Oleh karena itu, pihak yang ada didalam usaha dapat memiliki pergerakan yang cukup luas sehingga dapat mengutarakan inovasi atau rancangan produk baru agar sesuai dengan kondisi pasar.

Dari definisi dan ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor yang awal berdirinya berada pada sektor informal serta untuk memulai suatu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini modal awalnya cukup terjangkau. Oleh karena itu, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini akan banyak diminati pengusaha-pengusaha baru yang memiliki keinginan untuk terjun dalam dunia usaha karena sangat mudah suatu individu memulai usaha baru berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Melalui berdirinya usaha baru, membutuhkan tenaga kerja, bahan baku, dan faktor produksi yang lainnya. Dengan demikian maka pasar akan berjalan dan juga dapat menggerakkan roda perekonomian.

2.3 Peran Pemerintah

Soerjono Soekanto (2009), Mengemukakan bahwa peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia (*actor*) menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Kanfer (1987), menyebutkan lima aspek penting peran sebagai berikut :

1. Peran bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran berkaitan dengan perilaku kinerja (*task behavior*).
3. Peran sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*)
4. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilakuutama.
5. Peran dapat pekerjaan (*jobs*) tidaklah sama.

Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan lain sebagainya. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai lembaga atau badan resmi yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan lain sebagainya. Dilihat dari sifatnya, pengertian pemerintah dalam arti luas merupakan seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Suhady: 2009).

Ada dua macam fungsi pemerintah yang terdiri dari fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak-pihak yang diperintah. Maksudnya disini fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat karena semakin meningkat kondisi yang diperintah, maka semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang diperintah, maksudnya semakin tinggi taraf hidup maka semakin kuat *bargaining position*, dan semakin *integrative* masyarakat yang diperintah serta semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Fungsi pemerintah berubah, dari *rowing* ke *steering*. Jika kondisi ekonomi masyarakat lemah, pemerintah menyelenggarakan pembangunan. Semakin berhasil pembangunan, semakin meningkat kondisi ekonomi masyarakat, semakin berkurang fungsi pemerintah dalam pembangunan, maka kondisi ekonomi akan semakin lemah. Oleh sebab itu, konsep *development* tidak dikenal di negara maju, tetapi populer di negara berkembang (Ndraha 2003).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dari pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggaraan pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Majene yakni Dinas Koperasi dan UMKM yang berperan sebagai pemeran utama dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Sendana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki urusan wajib yang harus diselenggarakan. Pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah, dijelaskan bahwa penanganan urusan wajib seperti koperasi dan usaha kecil menengah, hendaknya dikelola oleh sebuah satuan direktur yang berbentuk dinas.

Oleh karena itu, peran pemerintah pusat maupun daerah berperan penting untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di agar menjadi tonggak dari perekonomian nasional maupun daerah, dimana pembangunan ekonomi nasional dan daerah tidak dapat terlepas dari kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disektor Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sangat berjasa dalam penyediaan lapangan pekerjaan karena dapat mengurangi angka pengangguran. Sementara itu, Gede Diva (2009), menyatakan terdapat peran pemerintah yang menurutnya efektif dalam hal pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai berikut:

2.3.1 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat mencapai target yang dituju. Jika Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah melakukan berbagai cara misalnya memberikan Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barangmaupun jasa, berupa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisinya menjadi tidak tergantung. Dalam konteks fasilitas pemerintah dapat berupa, pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa, kebijaksanaan yang tersendiri. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat terjadi tergantung pada bagaimana pemerintah memandang keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar netral yakni pemerintah memberlakukan satu pelaku usaha sama dengan pelaku usaha lainnya, tidak ada aturan khusus bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diantara yang lain, sehingga mampu bersaing dengan badan usaha lain. Kemudian pemerintah simpati dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha atau doronganmotivasi dan perlindungan terhadap pelaku usaha pada pembuatan aturan.

2.3.2 Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat tumbuh dan berkembang dengan mudah dan cepat. Pembuatan kebijakan untuk kegiatan usaha Mikro memang sangat diperlukan mengingat bahwa suatu usaha apapun jenis dan tipenya harus memiliki landasan kerja berupa kebijakan. Karena itu khususnya mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kebijakan yang sangat diperlukan salah satunya adalah pembuatan sertifikat agar pemerintah mengatur dan menetapkan suku bunga pinjaman modal usaha yang rendah serta mempermudah jaminan dalam mencairkan dana pinjaman modal usaha. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar perkembangan dan persaingan usaha dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam fungsi regulator ini, pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintahan daerah. Keduanya memiliki wewenangnya sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang berada di daerahnya masing-masing.

2.3.3 Pemerintah Sebagai Katalisator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses perkembangan usaha.

Peran pemerintah sebagai katalisator lebih cenderung kepada penyampaian informasi secara komprehensif mengenai suatu persoalan yang menjadi perhatian baik pemerintah maupun masyarakat. Masalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bukan hanya masalah pemerintah tetapi juga masalah masyarakat. Sehingga kedua komponen bangsa ini diperlukanketerlibatannya agar masalah ini dapat diselesaikan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai berbagai aspek dalam kaitannya dengan UMKM, sementara pemerintah memiliki kompetensi yang memadai, baik mengenai teori maupun praktek dalam pengelolaan UMKM. Karena itu, selaku pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, maka dengan sendirinya pemerintah berkepentingan menjadi katalisator yang efektif dan efisien. Keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, tetapi hanya sebagai faktor mempercepat saja. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti pemberian penghargaan terhadap pelaku usaha, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif, permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2.4 Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengembangan merupakan sebuah kegiatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada saat ini sudah bisa dipergunakan dengan tujuan untuk memanfaatkan serta mempergunakan teori dan kaidah ilmu pengetahuan yang telah diuji dan terbukti kebenarannya. Kegiatan ini juga dilakukan dengan tujuan untuk selanjutnya dapat menjadi dasar data serta informasi dalam rangka meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada sehingga memungkinkan untuk diciptakannya sebuah teknologi baru.

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih majulagi. Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya proses peningkatan omset penjualan.

Alim Sumarno (2012), Mengemukakan bahwa pengembangan dilakukan dengan hasil dari analisis yang sebelumnya telah dilakukan. Dari analisis tersebut diharapkan pengembangan atau tindakan yang dilakukan dapat berjalan dengan tepat dan sesuai sasaran yang diinginkan. Analisis ditekankan pada Analisis kontekstual, analisis awal sampai akhir, Analisis kebutuhan dan Pendekatan *natural development*.

Sedangkan menurut Tambunan (2002), Menyatakan bahwa pengembangan ekonomi baik secara langsung membawa dampak bagi perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang positif maupun negatif. Laju perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) dipengaruhi oleh kondisi pembangunan ekonomi secara umum. Tidak hanya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), namun semua jenis usaha baik kecil maupun besar merupakan bagian daripada pembangunan ekonomi, sehingga semua perkembangannya dipengaruhi oleh kondisi pembangunan ekonomi.

Dari berbagai definisi pengembangan yang telah dijelaskan diatas, kesimpulan dari pengembangan adalah suatu proses memperbaiki kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi atau pihak yang bersangkutan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Dalam penelitian ini, pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah agar dapat meningkatkan daya saing dari pelaku usaha.

2.5 Penelitian Terdahulu

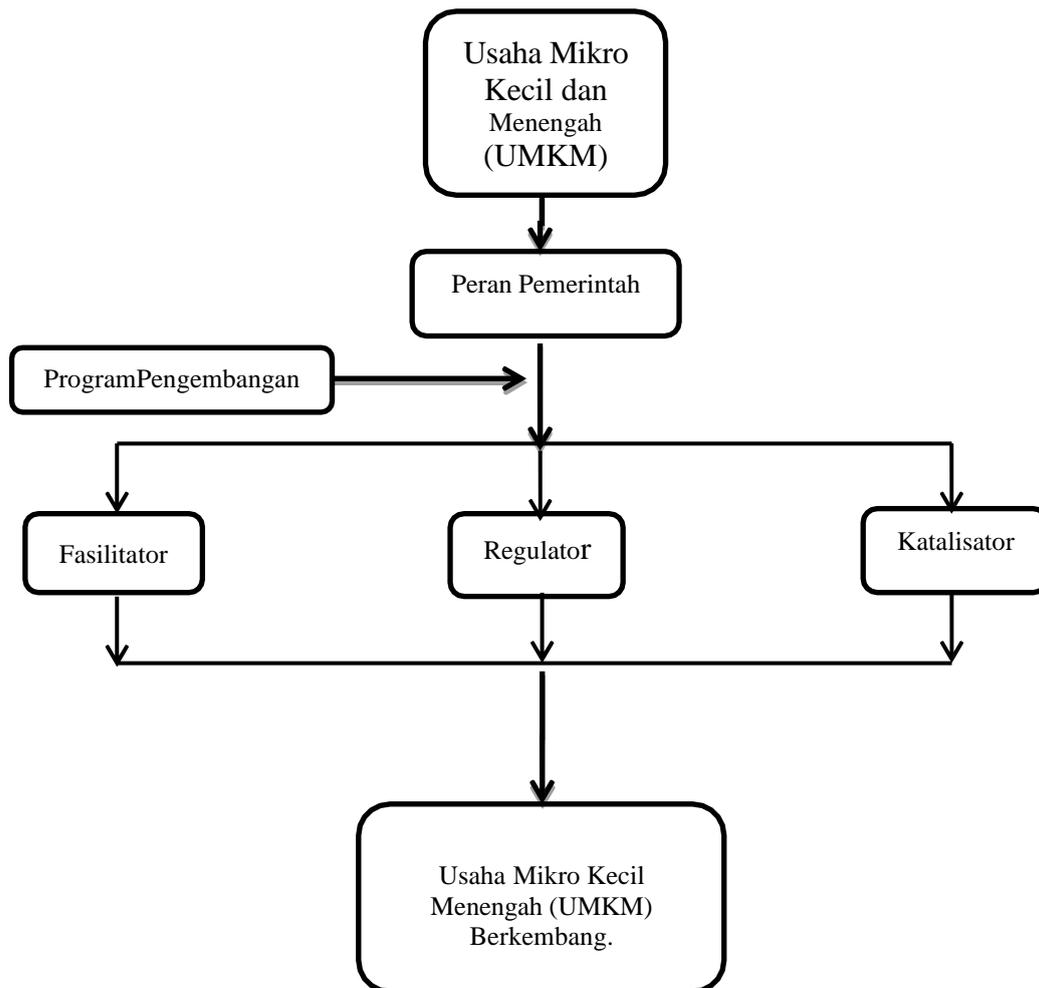
Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Peneliti	Tujuan	Hasil
1	Peran Pemerintah dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Kasus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mebel di Kabupaten Pati (Subarsono, 2014)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menganalisis peran Pemerintah dalam perkembangan UMKM mebel di Kabupaten Pati 	Melalui penyediaan infrastruktur fisik (penyediaan bahan baku, promosi, membangun jaringan/kemitraan) dan ekonomi, pelatihan dan bantuan peralatan, perlindungan usaha serta akses permodalan. Peran ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dimana peran tersebut berdampak pada peningkatan omzet, asset, jumlah tenaga kerja dan jumlah UMKM mebel yang terus bertambah.
2	Strategi Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Surakarta Dalam pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), (Paramasari, 2009).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengetahui strategi pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. 	Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta melakukan kegiatan kegiatan yaitu Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Bagi UMKM, Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM, Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, Penyusunan Kebijakan Tentang UMKM, dan Fasilitasi Pengembangan UMKM. Faktor yang mendukung adalah tersedianya dana atau anggaran yang memadai, jalinan kerjasama dengan Para stakeholders, serta adanya sarana dan prasarana yang memadai.

2.6 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan satu bangunan tentang hubungan variabel dengan variable lainnya, oleh karena itu melihat dari permasalahan yang ada maka peneliti mencoba membuat skema kerangka berfikir yang sistematis dengan menjadikan perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi variabel utama yang kemudian melalui Peran Pemerintah dari sisi fasilitator, regulator dan katalisator yang direncanakan dengan gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikir